

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini hasil peneliti terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam penelitian ini, disamping untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berpikir peneliti. Dimana penulis mengambil penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Yesinta dan Annisa Sativa. 2025. UIN Sumatera Utara.

IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JALAN TERHADAP KEWENANGAN UPTD. PUPR TANJUNG BALAI TERKAIT PERBAIKAN JALAN RUSAK. Jalan merupakan infrastruktur vital yang mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan konektivitas antar wilayah. Namun, permasalahan jalan rusak masih sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di Desa Sei Pasir, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan. Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan telah mengatur secara tegas mengenai pembagian kewenangan pengelolaan jalan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, namun dalam pelaksanaannya di lapangan, masih ditemukan ketidaksesuaian antara regulasi dan realita. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kewenangan UPTD. PUPR Tanjung Balai dalam menangani perbaikan jalan rusak di daerah tersebut telah diimplementasikan secara efektif. Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat perbaikan jalan di Desa Sei Pasir, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan, dan menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara dalam menangani permasalahan jalan rusak berdasarkan perspektif siyasah dustiyah. Siyasah dusturiyah yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip tujuan perundang-undangan untuk kemaslahatan umum dan pemerintahan yang adil dalam islam. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, Data yang diperoleh Data Primer dan Data Sekunder, teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, wawancara dilakukan oleh UPTD. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Balai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dalam penyelenggaraan jalan di Desa Sei Pasir, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan belum berjalan optimal dikarenakan terbatasnya anggaran untuk perbaikan jalan dan saat ini hanya dilakukan pembukaan ruas jalan dan penimbunan jalan. Dalam perspektif siyasah dusturiyah menekankan perlunya prinsip kemaslahatan umum dan keadilan serta kewenangan UPTD. PUPR Tanjung Balai dalam penyelenggaraan jalan.

Penelitian sama-sama mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan dalam penanganan jalan rusak, perbedaan pada fokus kajian, pendekatan, dan perspektif analisis. Penelitian saya Muhammad Novaldi selaku peneliti berfokus pada implementasi kebijakan terhadap kondisi jalan rusak di Desa Teluk Baru dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teori

implementasi kebijakan, sehingga menekankan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara itu, penelitian Yesinta dan Annisa Sativa menggunakan pendekatan hukum empiris yang dipadukan dengan perspektif *siyasah dusturiyah*, dengan fokus pada kewenangan UPTD PUPR Tanjung Balai dalam penyelenggaraan perbaikan jalan serta tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan demikian, perbedaan utama kedua penelitian terletak pada orientasi analisis, yaitu implementasi kebijakan publik pada penelitian pertama dan analisis kewenangan hukum serta perspektif hukum Islam pada penelitian kedua.

2. Rahmaniya. 2020. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
IMPLEMENTASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM PERBAIKAN JALAN RUSAK PERSPAKTIF FIQH SIYASAH. Jalan merupakan infrastruktur yang mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya sebagai sarana transportasi yang merupakan unsur penting dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan untuk mengembangkan kehidupan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Jalan menghubungkan satu daerah ke daerah yang lainnya, hal ini akan sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu daerah. Kerusakan jalan yang terjadi diberbagai daerah saat ini merupakan permasalahan yang kompleks dan kerugian yang diderita sungguh besar bagi pengguna jalan, seperti terjadinya waktu tempuh yang lama, kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain. Peran jalan juga sangat penting dalam bidang kesehatan. Jalan

yang rusak juga dapat meningkatkan terjadinya rawan kecelakaan, apa lagi saat hujan turun saat jalan rusak yang berlubang digenangi air maka pengguna jalan tidak dapat melihat jalan yang berlubang itu. Untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana semestinya, pemerintah mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan jalan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam perbaikan jalan di jalan Kuala desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur? Dan Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam perbaikan jalan rusak di jalan Kuala desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur?. Dilihat dari jenisnya penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan langsung pada responden. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang diperoleh penulis yaitu melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. penelitian data dan informasi bersumber dari lapangan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kondisi jalan yang rusak parah memperlihatkan kurangnya mendapat perhatian dari pemerintah. Yang dalam hal ini pemerintah daerah ataupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai pemerintah yang berwenang dalam hal pemeliharaan jalan. Pelayanan yang diberikan pemerintah daerah ataupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memang tidak bisa semua diperbaiki ataupun dipelihara karena

melihat dari anggaran yang diberikan pemerintah daerah hanya untuk beberapa jalan yang diputuskan dan di prioritaskan tidak sebanding dengan banyaknya jalan yang harus diperbaiki dan dipelihara. Pemerintah dalam hal al-sult{ah al-tanfi>>z}|iyyah sebagai pelaksana ketetapan hukum harus menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang (Siya>sah Dustu>riyyah). Berbicara tentang peran pemerintah daerah dalam perbaikan jalan rusak Al-Quran membicarakan tentang amanat yang mana pemerintah telah diamanatkan untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang. Dalam Islam juga diterangkan bahwa pemerintah tidak boleh mengkhianati amanah yang sudah dipercayakan kepadanya dan harus berlaku adil dalam menetapkan hukum.

Penelitian saya memiliki perbedaan pada fokus kajian, landasan teori, dan perspektif analisis. Penelitian saya berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teori implementasi kebijakan untuk menganalisis aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara itu, penelitian Rahmaniya lebih menitikberatkan pada implementasi peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam perbaikan jalan rusak yang dianalisis melalui perspektif *fiqh siyasah*, sehingga menekankan tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana amanah berdasarkan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Dengan demikian, perbedaan utama penelitian terletak pada orientasi analisis, yaitu evaluasi implementasi kebijakan publik dan kajian normatif mengenai peran pemerintah dalam perspektif hukum Islam pada penelitian Rahmaniya.

B. Novelty Penelitian

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya. Meskipun secara umum memiliki kesamaan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan, penelitian ini menghadirkan beberapa perbedaan mendasar yang menjadi nilai tambah dan pembeda dari penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Tahun penelitian; Penelitian ini dilakukan pada tahun 2026 dengan pasal yang berbeda, sehingga memberikan gambaran yang lebih aktual dibandingkan penelitian sebelumnya.
2. Lokasi penelitian; Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Teluk Baru Kecamatan Amuntai Selatan Hulu Sungai Utara dan Dinas PUPR, yang berfokus terhadap kinerja dalam hal pelaksanaan perbaikan serta pengawasan infrastruktur jalan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jalan di Desa Teluk Baru Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai utara.
3. Fenomena masalah; Penelitian ini mengangkat fenomena spesifik seperti kompetensi pihak PUPR terhadap perencanaan perbaikan jalan, kondisi jalan yang rusak membuat aktivitas dan mobilitas masyarakat menjadi lambat, tidak ada koordinasi dari Dinas PUPR kepada Kepala Desa dan masyarakat.
4. Teori yang digunakan untuk mempengaruhi pengimplementasian terhadap kondisi jalan yang rusak dan dilihat dari indikator- indikator yang digunakan.

C. Tinjauan Teortis

1. Kebijakan Publik

Buku Kebijakan Publik (Ika Widiastuti, 2022:2) Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Pengertian kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Buku Arafat (2023:1-2) Kebijakan publik merujuk pada proses dan hasil keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik mencakup langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengatasi isu-isu publik, mempromosikan kepentingan masyarakat, dan mengelola sumber daya yang ada.

Buku Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Agustino, 2020:16) Menurut Anderson (1990:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai: "*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.*" Dalam bahasa yang sederhana, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang

diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Definisi ini didasarkan pada teori kebijakan publik yang melibatkan beberapa konsep kunci, antara lain:

- a. Proses kebijakan: Kebijakan publik melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari perumusan masalah hingga evaluasi dampak kebijakan. Proses ini melibatkan interaksi antara pemangku kepentingan, pembuatan keputusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.
- b. Tujuan publik: Kebijakan publik bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, melindungi lingkungan, dan menjaga keadilan sosial.
- c. Pengambilan keputusan: Kebijakan publik melibatkan proses pengambilan keputusan yang melibatkan analisis berbagai faktor, seperti aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan. Keputusan ini biasanya didasarkan pada informasi yang dikumpulkan, penilaian risiko, dan konsultasi dengan para ahli dan pemangku kepentingan terkait.

Buku Teori Kebijakan Publik (Iriawan, 2024:95) kebijakan publik merupakan salah satu tahap penting dalam proses kebijakan publik yang melibatkan pengembangan pilihan-pilihan strategis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan telah diangkat menjadi isu dalam agenda publik. Formulasi kebijakan ini dapat dipahami

sebagai tahap perumusan alternatif-alternatif solusi untuk menangani persoalan tersebut. Dalam konteks kebijakan publik, formulasi berfungsi untuk merumuskan batasan dan ruang lingkup kebijakan yang akan diterapkan; dengan tujuan memastikan bahwa kebijakan yang dirancang mampu memberikan solusi yang relevan dan efektif

Buku Kebijakan Publik, Taufiqurokhman (2024:13) Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever government choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik, misalnya pemerintah tidak membuat kebijakan ketika mengetahui bahwa ada jalan raya yang rusak. James E. Anderson (1979:3) mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.

Buku Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Publik (Marwiyah, 2022:13) Kebijakan merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak pemerintah tersebut.

2. Implementasi Kebijakan

Buku Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Agustino, 2022:144) Implementasi kebijakan secara dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks

bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Journal of Community Positive Practices, Khan (2016) The term “policy implementation” has been defined by many scholars from various perspectives. Implementation is an important stage of the policy-making process. It means the execution of the law in which various stakeholders, organisations, procedures, and techniques work together to put policies into effect with a view to attaining policy goals. Implementation can be viewed as a process, an output and an outcome, and it involves a number of actors, organisations and techniques of control. It is the process of the interactions between setting goals and the actions directed towards achieving them Views implementation as the application of the policy by government administrative machinery in order to achieve the goals. Specifically, policy implementation encompasses those actions by public and private individuals that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions (Meter & Horn, 1975). The constituent element of most cited definitions of implementation is the gap that exists between policy intent and outcomes. Implementation studies, therefore, place emphasis on understanding the success or failure of public policy by elaborating on factors that affect it. This concept of implementation helps to draw the attention of policy makers and implementers to study the processes that influence and establish the outcome of public policy.

Menurut Van Meter dan Van Horn, ada enam faktor berbeda yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu implementasi yaitu:

- 1) Standar dan Sasaran Kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.
- 2) Sumber Daya
Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non-human resources*).
- 3) Hubungan Antar Organisasi
Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program
- 4) Karakteristik Agen Pelaksana
Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi
Variabel ini mencakup berbagai faktor yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Faktorfaktor ini mencakup jumlah sumber daya keuangan yang tersedia, tingkat dukungan dari kelompok kepentingan, karakteristik partisipan (seperti penerimaan atau penolakan), sifat opini publik mengenai lingkungan hidup, dan tingkat dukungan dari elit politik.
- 6) Disposisi Implementor
Disposisi pelaksana ini terdiri dari tiga elemen penting: (a) persepsi pelaksana kebijakan, yang mempengaruhi kesiapannya untuk melaksanakan kebijakan tersebut; (b) pemahaman atau kognisi pelaksana kebijakan; dan (c) intensitas disposisi pelaksana, atau nilai-nilai yang dianut oleh pelaksana (Disa dan Friska, 2025:5-6)

Edward mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat empat faktor atau variable kritis dalam implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap kecenderungan) dan struktur birokrasi. Adapun secara terperinci Edwards III (1980) menjelaskan keempat faktor tersebut sebagai berikut:

a. Komunikasi

Terdapat tiga aspek pokok yaitu : transmisi (*Transmission*), dan Koordinasi (*Coordination*).

b. Sumberdaya

Terdapat empat aspek pokok yaitu : Staf (*Stafs*) dan Fasilitas (*Facility*).

c. Disposisi

Komitmen (*Commitment*), Responsivitas (*Responsiveness*), dan Tanggung Jawab (*Responsitbility*).

d. Struktur Birokrasi

Terdapat dua aspek pokok yaitu : *Standar Operating Prosedurs* (SOP) dan *Fragmentasi*.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Buku Ika Widiastuti yang berjudul kebijakan publik, (2022:45) Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udoji (1981,32) dengan tegas mengatakan bahwa “*The execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented.*”(Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Dengan kata lain pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui.

Implementasi kebijakan dibutuhkan pendekatan dan ilmu yang komprehensif sejalan dengan yang dikemukakan Nicholas Henry (1998:33) sebagai berikut:

a. Pendekatan Politik

Istilah pada pendekatan ini mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruh diantara dan yang terjadi dalam organisasi birokrasi. Asumsi dasarnya tidak lepas dari proses kekuasaan yang terjadi dalam keseluruhan proses kebijakan publik. Misalnya, adanya beberapa kelompok kepentingan penentang kebijakan yang berusaha untuk mengganjal bahkan memboikot usaha dari berbagai pendukung kebijakan yang ada dan serta merta dapat menjadi faktor penghambat dalam proses pelaksanaan kebijakan publik. Rhodes, N (Wahab:2004:29). Dengan demikian sukses dan gagalnya suatu kebijakan publik, akhirnya dipengaruhi oleh kesediaan dan kemampuan berbagai kelompok kepentingan dominan yang mungkin terdiri atas berbagai koalisi kepentingan yang memaksakan kehendak. Dalam kondisi tertentu distribusi kekuasaan dapat pula menimbulkan kemacetan pada saat implementasi kebijakan, walaupun sebenarnya kebijakan publik secara formal telah diarahkan.

b. Pendekatan Struktural

Melalui pendekatan ini secara umum dapat dikenali bahwa struktur yang bersifat “Organis” Nampak relevan untuk implementasi kebijakan. ini sangat dimungkinkan sebab implementasi kebijakan

senantiasa berubah, terlebih ketika arus implementasi itu liar bukan linear.

c. Pendekatan Prosedural dan Managerial

Pendekatan prosedural struktural dianggap relevan untuk proses implementasi kebijakan publik, namun tidak sepenting upaya untuk mengembangkan proses dan prosedur yang tepat, termasuk dalam hal ini adalah proses dan prosedur tatakelola beserta berbagai teknik dan metode yang ada. Prosedur dimaksud diantaranya terkait dengan proses penjadwalan (*scheduling*) perencanaan (*planning*) dan pengawasan (*controlling*) kebijakan publik. Wujud pendekatan managerial ini diantaranya dapat ditemui pada perencanaan jaringan kerja dan pengawasan (*network planning and control*) atau disebut NPC. Pendekatan ini menggambarkan suatu kerangka kerja dimana proyek dapat direncanakan dan proses implementasinya dapat diawasi dengan cara mengidentifikasi berbagai tugas yang harus diselesaikan, urutan pelaksanaan waktu bahkan anggaran yang dikeluarkan.

d. Pendekatan Perilaku

Analisis keprilakuan (*behavioral analysis*) pada berbagai masalah manajemen yang paling terkenal adalah apa yang seringkali disebut para penganut aliran organisasi sebagai “*Organitational development*” atau pengembangan organisasi. Pendekatan ini menekankan pada proses untuk menimbulkan berbagai perubahan yang diinginkan dalam suatu organisasi melalui penerapan ilmu keprilakuan (Eddy, 1981:72). Selain itu, pengembangan organisasi juga merupakan

salah satu bentuk konsultasi manajemen dimana seorang konsultan bertindak selaku agen perubahan untuk mempengaruhi seluruh budaya organisasi yang ada termasuk pada dimensi sikap dan perilaku pejabat yang menduduki posisi kunci. (Ika Widiastuti 2022:48-50)

Implementasi atau penerapan kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan kebijakan public yang menentukan apakah sebuah kebijakan bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh masyarakat. Implementasi kebijakan memiliki beberapa jenis model seperti model implementasi dari Grindle, model Implementasi Edward III, model Implementasi oleh Meter dan Horn, dan model Luther Gullick.

Menurut Grindle suatu implementasi kebijakan publik dapat dikatakan berhasil apabila tercapainya tujuan yang diraih. Model implementasi kebijakan yang dikemukakan Grindle dalam Fajarwati dan Rahmadila (2022) dikenal dengan *“implementation as a political and administrative process”*. Grindle mengemukakan keberhasilan dari implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari dua hal yaitu: 1) dilihat dari prosesnya, sudah atau belum sesuai dengan design (ketentuan) yang merujuk pada aksi kebijakannya, dan 2) tercapainya suatu kebijakan. Dimensi ini dapat diukur dari dua faktor yaitu dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu atau kelompok dan tingkat perubahan yang terjadi. Menurut Grindle keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh variabel-variabel implementasi yang terdiri atas:

- 1) Isi kebijakan (*Content Of Policy*) antara lain:
 - a. Kepentingan yang mempengaruhi (*interest effected*). Berbagai kepentingan dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.
 - b. Tipe manfaat (*Type of benefits*). Suatu kebijakan harus menghasilkan beberapa jenis manfaat yang positif.
 - c. Derajat perubahan yang ingin dicapai (*Extent of change envision*). Setiap kebijakan publik harus memiliki target capaian dengan skala yang jelas.
 - d. Letak pengambilan keputusan (*Site of decision making*). Salah satu proses penting dalam implementasi kebijakan publik ialah pengambilan keputusan yang bermanfaat untuk memastikan sebuah program yang telah dibuat tersebut sudah tepat.
 - e. Pelaksanaan program (*Program implementer*). Program yang dijalankan berdasarkan suatu kebijakan yang kompeten dan memiliki kapabilitas.
 - f. Sumber daya yang digunakan (*Resources commited*). Sumber daya dalam implementasi kebijakan dapat menjadi faktor penentu keberhasilan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- 2) Lingkungan Implementasi (*Content Of Impelementation*) yaitu terdiri dari:
 - a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat (*power, interest, and strategy of actor involed*).
 - b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*institusion and regimcharacteristic*).
 - c. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana (*compliance and responsiveness*).

Menurut teori Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Ravyansah et al (2022) disebutkan bahwa diperlukan identifikasi variabel dalam menganalisis pengimplementasian suatu kebijakan. Adapun variabel tersebut terdiri dari:

- a. Mudah tidaknya masalah tersebut untuk dikontrol.
 - 1) Kesulitan-kesulitan teknis
 - 2) Keragaman perilaku kelompok sasaran
 - 3) Persentase pelaksana sasaran kebijakan dibandingkan dengan jumlah penduduk
 - 4) Ruang lingkup perubahan yang ingin dicapai

- b. Kemampuan kebijakan dalam menstruktur proses implementasi.
 - 1) Kelugasan dan konsistensi terhadap tujuan
 - 2) Dipergunakannya teori kausalitas
 - 3) Rekrutmen pejabat pelaksana
- c. Pengaruh yang ditimbulkan dari berbagai variabel terhadap keseimbangan dalam mendukung kebijakan.
 - 1) Situasi sosial, ekonomi, dan teknologi
 - 2) Adanya support politik serta dukungan dari pejabat atasan
 - 3) Komitmen dalam melaksanakan kebijakan
 - 4) Gaya kepemimpinan pejabat pemerintah pelaksana

Menurut Subarsono dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik, (2020:89-92) Keberhasilan emplementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variable atau factor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat dalam emplementasi, Teori yang mendukung emplementsi ini salah satunya teori dari George C. Edwads III (1980).

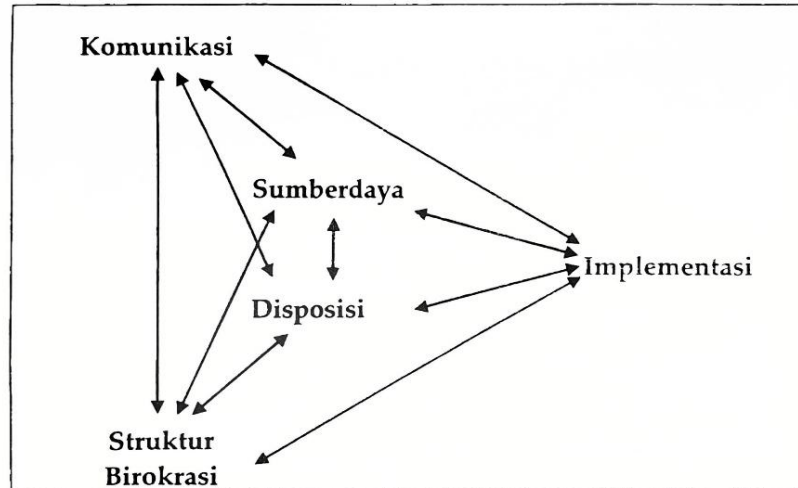
Pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni (1) komunikssi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, (4) Struktur Birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementsi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Gambar 2.1
Faktor Penentu Implementasi

Faktor Penentu Implementasi menurut Edward III



Sumber Edwards III, 1980:148

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila ada implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat terwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di atas kertas menjadi dokumentasi saja.

3. Disposisi

Disposisi Adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau *SOP*). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut Luther Gullick dampak langsung terhadap implementasi.

Menurut Luther Gullick untuk mengukur keberhasilan atas pengimplementasian kebijakan setidaknya ada tujuh faktor yang menentukannya, yakni:

1. Planning (Perencanaan)
Perencanaan yang kata dasarnya "rencana" pada dasarnya merupakan tindakan memilih dan menetapkan segala aktifitas dan sumber daya yang akan dilaksanakan dan digunakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Organizing (Pengorganisasian)
Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagi tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerja sama di suatu institusi. Kegiatan pengorganisasian menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai prinsip pengorganisasian.
3. Staffing (Penyusunan Staf)
Pengisian jabatan (staffing) akan mempengaruhi "kepemimpinan dan pengendalian". Pengisian jabatan mengharuskan adanya pendekatan dengan sistem terbuka (open-system approach). Pengisian jabatan dilaksanakan di dalam institusi, yang pada gilirannya mempunyai hubungan dengan lingkungan luarnya.
4. Directing (Pengarahan)
Pengarahan adalah penjelasan, petunjuk, serta pertimbangan dan bimbingan terdapat para petugas yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar, dengan pengarahan staff yang telah diangkat dan dipercayakan melaksanakan tugas di bidangnya masing-masing tidak menyimpang dari garis program yang telah ditentukan.
5. Penganggaran (Anggaran)
Penganggaran termasuk salah satu fungsi manajemen. Penganggaran adalah fungsi yang berkenaan dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akuntansi.
6. Reporting (Pelaporan)
kegiatan penyampaian informasi mengenai perkembangan, hasil kegiatan, atau pemberian keterangan terkait segala hal yang terjadi dalam sebuah organisasi kepada pihak atasan atau mereka yang berwenang (kepala eksekutif/manajer).

Pernyataan yang lain, Meter dan Horn (1975) dalam Kurniawan dan Maani (2019) menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel-variabel pendukung. Model implementasi kebijakan oleh Meter dan Horn dikenal dengan "A model of

Policy Impelemntation” Dalam model ini Meter dan Horn menjelaskan bahwa kinerja publik dipengaruhi oleh beberapa variabel. Variabel yang dimaksud antara lain:

1. Standar dan sasaran kebijakan. Tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur melalui tujuan kebijakan yang bersifat realistis dan sosio-kultur. Dalam Kurniawan dan Maani (2020) Meter dan Horn mengatakan bahwa: “untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan harus menegaskan [ada standard dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan harus menegaskan pada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penelitian atas tingkat ketercapain standard dan sasaran tersebut”.
2. Sumber daya. Keberhasilan suatu Implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan ada tiga sumber daya yang harus diperhatikan yaitu: a) manusia yang berkualitas (tenaga kerja); b) sumber daya finansial menentukan terlaksananya suatu kebijakan, dan; c) sumber daya waktu terlaksananya suatu kebijakan yang telah ditetapkan Sumber daya tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.
3. Karakteristik dan pelaksana. Organisasi formal maupun organisasi informal menjadi agen pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Suatu implementasi kebijakan harus dilaksanakan oleh agen yang sesuai dengan ciri-ciri yang tepat. Penentuan karakteristik agen pelaksana dapat ditentukan melalui luas wilayah kebijakan. Pelaksana kebijakan dituntut menjadi disiplin dan ketat dalam menjalankan beberapa kebijakan. Dalam konteks lain, agen pelaksana yang demokratis dan persuasif juga diperlukan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang sesuai dengan karakteristik agen pelaksana tersebut.
4. Komunikasi antar organisasi. Standar tujuan implementasi kebijakan harus dapat dikomunikasikan dengan baik dan jelas kepada para agen pelaksana. Setiap implementator harus memahami standar yang telah ditetapkan dan tujuan yang akan dicapai.
5. Disposisi (sikap pelaksana). Sikap para pelaksana dipengaruhi oleh cara pandang terhadap pengaruh kebijakan kepentingan kepentingan pribadinya. Meter dan Horn dalam Kurniawan & Maani, (2020) menyebutkan ada tiga jenis elemen respon yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan dari para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan, yaitu: a) pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan; b) arah respon para pelaksana kebijakan seperti penerimaan, penolakan, atau netral, dan; 3) intensitas terhadap kebijakan.
6. Kondisi lingkungan sosial politik dan ekonomi. Lingkungan eksternal dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Lingkungan eksternal yang dimaksud mencakup lingkungan sosial,

ekonomi, dan politik. Kondisi lingkungan eksternal yang sangat kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan cara yang diperlukan lingkungan eksternal yang kondusif.

Teori implementasi kebijakan G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, menekankan bahwa keberhasilan kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor utama: kondisi lingkungan, hubungan antarorganisasi, sumber daya organisasi, dan karakteristik agen pelaksana. Model ini fokus pada bagaimana kebijakan diwujudkan dalam tindakan nyata.

1. Kondisi Lingkungan (*Environmental Conditions*)

Faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang mempengaruhi implementasi.

2. Hubungan Antarorganisasi (*Interorganizational Relationships*)

Koordinasi dan kerjasama antara berbagai lembaga atau aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

3. Sumber Daya Organisasi (*Organizational Resources*)

Ketersediaan sumber daya manusia, finansial, dan teknis yang memadai untuk mendukung implementasi.

4. Karakteristik Agen Pelaksana (*Characteristics of Implementing Agencies*)

Kapasitas, struktur, dan komitmen lembaga yang ditunjuk untuk menjalankan kebijakan.

4. Konsep Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa

1. Peran Kepala Desa

Peranan berasal dari kata “Peran” dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, peran didefinisikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Peran Kepala Desa sangatlah penting dalam pembangunan Desa, yaitu kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi di desa dalam mengatur dan mengurus perencanaan pembangunan di desanya, yaitu sebagai berikut:

- a. Peran Kepala Desa sebagai Motivator, merupakan motivasi, dorongan, rangsangan, pengaruh atau stimulasi yang diberikan seseorang individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang diberikan motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional dan penuh tanggung jawab. Menurut Effendi Motivasi adalah kegiatan memberi dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki.

- b. Peran Kepala Desa sebagai Fasilitator, merupakan orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama.
- c. Peran Kepala Desa sebagai Mobilisator, merupakan orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama.

2. Desa dan Pemerintah Desa

Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pembangunan Infrastruktur Jalan

a. Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur memiliki peran penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu dalam menunjang kelancaran pengembangan dan perkembangan suatu daerah karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai cenderung dalam proses pembangunan akan terlambat, bahkan hasilnya kurang maksimal.

b. Pembangunan Jalan

Definisi jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang dipergunakan bagi lalu lintas, yang berada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air.

5. Kerusakan Jalan

Menurut Baihaqi, ddk. (2025) Kerusakan jalan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, seperti beban lalu lintas berlebih, kualitas konstruksi yang kurang memenuhi standar, kondisi tanah dasar yang tidak stabil, hingga faktor lingkungan seperti curah hujan tinggi, genangan air, dan drainase yang tidak berfungsi. Kerusakan yang muncul pada perkerasan jalan biasanya berupa retak memanjang, retak kulit buaya, rutting, lubang, dan pengelupasan permukaan. Masing-masing bentuk kerusakan memiliki karakteristik dan implikasi yang berbeda terhadap fungsi jalan. Retak kulit buaya misalnya, menunjukkan kegagalan struktural akibat kelelahan material perkerasan. Sementara itu, lubang biasanya merupakan kerusakan lanjutan akibat masuknya air ke dalam lapisan perkerasan. Kondisi-kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena dapat berkembang cepat apabila tidak dilakukan penanganan secara tepat.

6. Sistem Manajemen Jalan Terhadap Jalan Yang Rusak

Menurut Siswanto, dkk. (2017) Terhitung sejak awal 1980-an, sejumlah sistem manajemen telah dikembangkan di Indonesia untuk membantu pemerintah dalam perencanaan, desain, dan pelaksanaan pekerjaan perbaikan jalan dan pemeliharaan.

Sistem manajemen jalan terdiri dari serangkaian langkah-langkah proses dalam kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan. Langkah-langkah proses tersebut awalnya banyak manual tetapi pada akhirnya banyak menggunakan fasilitas komputer sebagai alat bantu penyimpanan data dan pemroses data. Umumnya langkah-langkah tersebut adalah:

1. Pengumpulan data infrastruktur dan lalu-lintas
2. Penyimpanan dan pengolahan data
3. Perencanaan dan program pekerjaan jalan di masa akan datang
4. Desain dan persiapan kontrak
5. Pelaksanaan dan pemantauan pekerjaan

Diakui secara luas adanya masalah akut dalam hal kualitas dan ketepatan waktu pembangunan dan pemeliharaan jalan di Indonesia, termasuk sebagian besar jalan daerah, terlepas dari mekanisme penyerahan hasil yang digunakan, pembangunan dan pemeliharaan jalan ditandai oleh kurangnya mekanisme akuntabilitas teknis yang efektif.

Program pemeliharaan perkerasan jalan yang akuntabel dan efektif adalah yang dirancang dengan selalu mempertimbangkan dua hal, yaitu tingkat pelayanan jalan yang diharapkan dan ketersediaan dana. Dengan

keterbatasan alokasi dana yang terjadi pada jalan kabupaten maka perlu dilakukan strategi yang tepat untuk dapat mengoptimalkan tingkat pelayanan.

Program pemeliharaan perkerasan jalan dirancang dengan selalu mempertimbangkan dua hal, yaitu indeks permukaan jalan yang diharapkan dan ketersediaan dana. Untuk mendapatkan suatu program pemeliharaan yang baik maka kriteria yang harus dipenuhi adalah dengan mengoptimalkan dua hal tersebut di atas, dimana tingkat pelayanan jalan tidak terabaikan dan biaya pemeliharaan jalan tidak terlalu besar. Besarnya anggaran pemeliharaan jalan merupakan bagian dari kebijakan publik yang akan menentukan kualitas pelayanan jalan.

Pemeliharaan jalan bertujuan untuk melaksanakan pemeliharaan jalan secara efisien dan efektif, agar kondisi jaringan jalan selalu dalam keadaan baik. Konsep pemeliharaan jalan dalam pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari lima komponen utama yaitu database, perencanaan umum, penyusunan program, persiapan pelaksanaan, pelaksanaan dan evaluasi, dimana kelima komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain. Fungsi-fungsi manajemen tersebut dilakukan melalui proses yang mengoptimalkan kinerja jaringan jalan dari waktu ke waktu. Rukka (2023).

1. Penyusunan Bank Data (Data Base)

Melalui pengumpulan data dan survei lapangan, tahapan pertama dikembangkan suatu data base mampu menampung banyak data mengenai kondisi geografis dan geometrik jaringan jalan dengan segala permasalahan dan kondisinya.

2. Perencanaan Umum (Planning)

Tahapan ini dilakukan sebuah identifikasi kebutuhan pemeliharaan jalan secara keseluruhan. Kegiatan ini terdiri dari analisis jaringan jalan secara menyeluruh, dengan tujuan untuk menentukan kebutuhan biaya jangka menengah/jangka panjang berdasarkan target yang telah ditetapkan.

3. Pemrograman (Programming)

Tahapan ini dilakukan kegiatan kelayakan pekerjaan pemeliharaan untuk dilakukan pada waktu satu tahun kedepan. Kegiatan ini ditentukan oleh program tahunan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan masing-masing ruas jalan, baik berdasarkan biaya yang telah diperkirakan maupun berdasarkan biaya yang sudah ditentukan. Analisis lebih detail dilakukan ruas per ruas untuk menentukan biaya dan prioritas penanganan dengan kondisi ruas dan dana yang tersedia. Program tahunan ini bertujuan mempersiapkan usulan pengajuan dan pemeliharaan jalan secara rutin tahunan.

4. Persiapan Pelaksanaan (Preperation)

Tahapan ini dibuatkan desain untuk pekerjaan pemeliharaan yang dilaksanakan satu tahun kedepan. Kegiatan yang dihasilkan yakni perencanaan teknik secara mendetail dan persiapan dokumen kontrak / dokumen tender yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeliharaan.

Kegiatan pemeliharaan dilakukan sesuai dengan alokasi anggaran yang diputuskan oleh otoritas yang berwenang, maka dari itu, pembagian pekerjaan dapat dilakukan dengan pertimbangan efektifitas pekerjaan. Setelah dokumen tender telah siap, maka dapat diserahkan pada panitia tender untuk dilakukan proses pengadaan kontraktor.

5. Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan (Operation & Evaluation)

Tahapan ini merupakan implementasi, operasi dan evaluasi terhadap kegiatan pemeliharaan yang telah direncanakan sebelumnya. Kegiatan ini meliputi aktifitas operasi pemeliharaan yang sedang berjalan, monitoring, dan pengendalian. Kegiatan ini dilakukan oleh unsur-unsur yang terkait dalam organisasi proyek, antara lain seperti: Tim Konsultan supervisi dan pengawas lapangan. Di bagian evaluasi ini dilakukan kajian baik pada hasil maupun alokasi dana dan target yang ditentukan yang hasilnya akan menjadi masukan untuk perbaikan selanjutnya. Hasil setiap bagian disimpan dalam bank data yang dapat dipergunakan untuk penyusunan program kedepan.

D. Kerangka Pemikiran

Buku Metodologi Penelitian (DR. Agung Edy Wibowo : 2020)

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Kerangka pemikiran menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan kepada

pembaca mengapa mempunyai angapan seperti hipotesis. Kerangka berpikir disajikan dengan bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti dan serta berkaitan antar variabel yang direliti.

Permasalahan yang ada pada Implementasi Kebijakan, (1) Sumber Daya dari Dinas PUPR tidak kompeten, dikarenakan Staf Dinas PUPR tidak memiliki kemampuan atau keahlian dalam hal merencanakan langkah demi langkah perbaikan jalan yang rusak hingga keterbatasan alat berat yang digunakan dalam perbaikan jalan, (2) Lambatnya respon dan komitmen Dinas PUPR dalam memperbaiki jalan yang rusak berdampak kepada aktivitas dan mobilitas masyarakat menjadi lambat, (3) Tidak ada koordinasi dari Dinas PUPR, bisa dilihat pihak PUPR tidak ada melaksanakan sosialisasi program perbaikan jalan yang rusak kepada semua aspek masyarakat di Desa Teluk Baru, maka dari itu difokuskan berdasarkan George C. Edward III dalam Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, (2020), faktor-faktor penentu implementasi sebagai berikut:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila ada implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat terwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di atas kertas menjadi dokumentasi saja.

3. Disposisi

Disposisi Adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau *SOP*). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

